KontraS

Pelayanan Klipping Divisi Informasi Dan Dokumentasi (INDOK)

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for Dissappearances and Victims of Violence

Perburuhan	Konsumen	Pertanahan	Demiliterisasi
Eko-Global	Perempuan	Lingkungan	Mafia Perad.
DKI Jakarta	Pemukiman	Ms. Miskin Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	2000	2001	2002	2003	2004														
Kompas	Media	Republika	Suara Pb	War Kot	Pos Kota	Sr Karya	Ry Mer	Bisnis In	Jkt Post	Pkr Ry																				



■ MEDIA/SAYUTI

■ **DATANGI PN JAKPUS:** Sri Sumarsih (kiri), salah satu keluarga korban kasus Semanggi I, berdialog dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rusdy Sa'ad (kanan) di Jakarta, kemarin. Keluarga korban kasus Trisakti, Semanggi I dan II mendatangi PN Jakpus untuk mendesak pengadilan memanggil paksa para tersangka pelanggar HAM dalam kasus itu.

Keluarga Korban Siap Datangi Rumah Perwira TNI

Pengusutan Kasus Trisakti bukan Balas Dendam

JAKARTA (Media): Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis menegaskan pengusutan kasus Trisakti bukan untuk balas dendam. "Karena itu, jangan ada kepentingan-kepentingan lain yang memboncengi pengusutan kasus Trisakti. Biarkan proses hukum mengalir seperti air di sungai. Kita butuh keheningan, kearifan, dan rekonsiliasi," katanya kepada *Media* di Jakarta, kemarin.

Namun, Mutis mengingatkan proses rekonsiliasi itu tetap mengedepankan kebenaran dan ketentuan-ketentuan hukum berkesinambungan.

Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 menewaskan empat mahasiswa, yakni Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan, dan Hafidin Royan. Kematian keempat 'Pahlawan Reformasi' itu memicu kerusuhan Mei 1998 yang disertai aksi tindak kekerasan dan pembakaran.

Untuk mengusut kasus Trisakti serta Semanggi I dan II, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi menolak permohonan KPP untuk memanggil paksa enam perwira TNI. Keenam anggota TNI itu adalah Jenderal (purn) Wiranto, Letjen Djaja Suparman, Kol Art Priyanto, Kolonel George Toisutta, Letkol DJ Nachrowi, dan Letkol Amril Amin.

Lebih lanjut Mutis menjelaskan, dalam pengusutan kasus Trisakti hendaknya tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah dan tidak ada intervensi dari mana pun.

"Ini (pengusutan kasus Trisakti) kasus yang menarik. Kita serahkan kepada kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku. Kita minta agar pengusutan ini tetap dalam porsi yang layak secara hukum," tandasnya.

Sementara itu, keluarga korban Trisakti serta Semanggi I dan II menyatakan siap menjemput para personel TNI/Polri yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPP HAM Trisakti-Semanggi I dan II.

Mereka mendatangi Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto dan PN Jakpus, kemarin, dan menegaskan kesediaan mereka menda-

Kesembilan orang tua korban yang kemarin mendatangi Komnas HAM dan PN Jakpus adalah Cece Sarweli, Faulia Siregar, Kadianto, Karsiyah, Lasmiati, Martini, Maria, Sri Sumarsih, dan Ho Kim Ngo.

Dalam kesempatan itu keluarga korban juga menyesalkan sikap Mabes TNI/Polri yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPP HAM. Arif menjelaskan penolakan itu merupakan cermin ketakutan terhadap proses pengadilan yang independen. "Kami mengutuk sikap prajurit yang tidak kesatria."

Menanggapi sikap keluarga korban itu, Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto menandaskan Komnas HAM dan KPP HAM sama sekali tidak terganggu oleh tekanan-dari mana pun.

Menurut Djoko, bukti bahwa proses ini masih berjalan, KPP HAM telah mengirim permohonan panggilan paksa terhadap enam orang personel TNI ke PN Jakpus.

Usai bertemu Djoko, rombongan keluarga korban mendatangi PN Jakpus. Di hadap-